



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 21 Oktober 2016

Halaman:

KPU Godok Aturan Kampanye

JOGJA, BERNAS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sedang menggodok aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye yang akan dijadikan acuan pemasangan selama masa kampanye Pilkada 2017. "Tujuan utamanya adalah mengatur tata cara dan tempat pemasangan alat peraga kampanye, termasuk mekanisme penertiban jika ada pelanggaran," kata Ketua Wawan Budiyo, KPU Kota Yogyakarta, Kamis (20/10). Aturan yang dibahas di antaranya

adalah tempat larangan pemasangan alat peraga kampanye yaitu di tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas umum dan pohon termasuk beberapa ruas jalan protokol seperti Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Margo Utomo hingga Jalan Margo Mulyo.

Meskipun demikian, lanjut Wawan, masih ada beberapa hal yang belum disepakati bersama, khususnya mengenai mekanisme penertiban alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. "Belum ada titik temu untuk hal ini

sehingga perlu dikomunikasikan lagi. Namun, kami menargetkan agar aturan mengenai pemasangan alat peraga kampanye ini bisa diselesaikan sebelum 28 Oktober," katanya.

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2017, KPU Kota Yogyakarta akan memberikan fasilitasi berupa pemasangan alat peraga kampanye seperti diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 dan setiap pasangan calon bisa menambah jumlah alat peraga maksimal 150 persen dari jumlah maksimal alat peraga yang difasilitasi KPU.

Alat peraga kampanye yang dimaksud dalam peraturan tersebut meliputi baliho atau billboard atau videotron dengan jumlah maksimal lima untuk setiap pasangan calon.

Selain itu umbul-umbul dengan jumlah 20 buah untuk setiap pasangan calon di tiap kecamatan dan spanduk maksimal dua untuk tiap pasangan calon di tiap kelurahan.

"Khusus untuk lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU, masih akan didiskusikan lebih lanjut dengan pihak terkait," katanya.

Selain pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kota Yogyakarta tengah menyusun rancangan mengenai jumlah maksimal dana kampanye yang bisa digunakan oleh setiap pasangan calon kepala daerah.

"Rancangannya sudah ada, tinggal kami sampaikan ke tiap pasangan calon kepala daerah," katanya yang masih memilih merahasiakan nilai maksimal dana kampanye yang bisa digunakan.

Pada Senin (24/10), KPU Kota Yogyakarta akan menetapkan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2017

dilanjutkan dengan pengundian nomor urut calon pada Selasa (25/10) dan pelaksanaan kampanye diawali pada Jumat (28/10).

Di Kota Yogyakarta, terdapat dua pasangan bakal calon kepala daerah yang mendafir yaitu Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi dan Imam Priyono-Achmad Fadli.

Suasana sejuk
Sementara itu, Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Alwi Shihab berharap setiap calon

► ke hal 15

KPU Godok Aturan

Sambungan dari halaman 9

kepala daerah mampu menunjukkan suasana, lebih sensitif, dan bukan justru mengeluarkan statemen yang dapat mengusik pihak yang lain.

"Ini perlu kita jadikan budaya kita supaya demokrasi kita di mata dunia yang selama ini sudah baik tidak tercoreng hal-hal yang bisa merusak atmosfer yang sudah kondusif selama ini," kata Alwi Shihab sesuai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Rabu (19/10).

1 Ia juga berharap teks ke-
2 agamaan tidak digunakan untuk
3 mendukung atau melegitimasi
4 kepentingan politik pihak tertentu
5

di setiap ajang pemilihan umum. "Teks-teks keagamaan baik dari Al Quran, Bibel atau yang lainnya jangan dipakai untuk urusan kepentingan politik," kata Alwi.

Alwi mencontohkan, teks keagamaan seperti yang tertuang dalam kitab suci Al Quran sejatinya diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh makhluk seisi alam sehingga tidak tepat jika justru dijadikan alat pembenar untuk bertindak atau mendiskreditkan kelompok atau pihak tertentu.

"Al Quran *rahmatan lil alamin*, rahmat bagi seluruh makhluk Tuhan termasuk tumbuh-tumbuhan. Jadi kita jadikan Al Quran

sebagai rahmat untuk semuanya," kata adik ulama ahli tafsir Quraish Shihab ini.

Selain meminta menghindari penggunaan teks agama, mantan Menteri Luar Negeri itu juga berharap pesta pemilihan kepala daerah serentak di berbagai daerah mendatang bersih dari isu Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) sebab jika isu SARA terus dibesar-besarkan akan mudah menyulut perpecahan bangsa.

"Dalam berdemokrasi jangan sampai menggunakan hal-hal yang bisa merusak kebersamaan kita. Soal SARA ini akan sangat berbahaya jika terus dibesar-besarkan," kata dia. (ant)

indak Lanjut

ituk Ditanggapi

ituk Diketahui

mpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005